



Syahadah

Newsletter on Religious Freedom

Edisi
01
Agustus 2009

Editorial

Jawa Timur selama ini dikenal sebagai propinsi yang pluralis. Di samping faktor heterogenitas masyarakatnya, kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup dominan juga diyakini sebagai penyangga pluralisme di kawasan ini. Sayangnya, semua keyakinan tersebut berkebalikan dengan fakta yang berkembang belakangan ini.

Justru Jawa Timur kini mulai beranjak menjadi puritan. Ini ditandai oleh kegairahan sejumlah kabupaten/kota dalam memproduksi Raperda/Perda Syariat. Pamekasan, Blitar, Jombang, dan Bangkalan adalah buktinya. Keempat kabupaten yang mendaku sebagai kota santri dan basis NU itu, kini sedang serius menerapkan Perda Syariat. Ini sekaligus membuktikan bahwa, NU kini tidak lagi bisa diposisikan sebagai penyangga pluralisme.

Perda Gerbang Salam Kabupaten Pamekasan; Perda Antipelacuran Kabupaten Jombang dan Blitar, dan; desakan kewajiban jilbab dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Bangkalan semuanya diinisiasi oleh NU atau PKB sebagai partai NU.

Betapapun Perda Syariat dipercaya bisa membentengi moral dan identitas kesantrian kota/kabupaten yang menerapkannya, akan tetapi hal ini tidak pernah sebanding dengan harga mahal yang harus dibayar berupa ancaman terhadap keberagaman, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan konstitusi.

Selamat membaca!

Bangkalan

Raperda Pewajiban Jilbab bagi Guru dan Siswa Perempuan

Hari Selasa, 7 Juli 2009, mungkin akan menjadi hari yang menentukan bagi kehidupan keberagaman di lingkungan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Pada hari itu, jajaran PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Bangkalan bersama dengan organisasi lain mengadakan hearing dengan DPRD setempat terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dalam kesempatan itu, PCNU Bangkalan mengusulkan agar seluruh siswi yang sudah berusia 9 tahun dan pegawai perempuan di lingkungan Pemkab Bangkalan wajib menggunakan busana muslim atau berjilbab. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga norma agama dan sekaligus menegaskan identitas kota santri. Usulan tentang kewajiban jilbab tersebut menjadi klausul dalam Raperda penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk pasal 62 ayat 2 yang secara detail mengatur tentang busana yang dipakai saat di sekolah.

Jika Raperda tersebut pada akhirnya disahkan menjadi Perda, maka seluruh sekolah yang ada di Bangkalan, baik itu negeri atau swasta, para pendidik maupun peserta didiknya wajib mengenakan jilbab.

Wakil ketua tanfidz PCNU Bangkalan, KH Badrus Sholeh, menyatakan bahwa usulan tersebut cukup beralasan untuk masuk ke dalam Raperda karena "akan mempertegas identitas Bangkalan sebagai kota santri." Di samping itu, menurut pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawiyah, akhir-akhir ini, busana yang dipakai oleh kalangan murid sudah banyak yang menyimpang dari norma agama. (Okezone.com, 28 Juli 2009).

Proses Inisiasi Raperda

Bisa dikatakan PCNU Bangkalan adalah inisiator kewajiban jilbab bagi sisi dalam draft Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bangkalan. Menurut salah satu sumber di lingkungan Pemda Bangkalan, pada tahun 2008, PCNU Bangkalan, melalui Dinas Pendidikan

Penerbit: CMARs Penanggung Jawab: Wahyuni Widyarningsih Pimpinan Umum: Ahmad Zainul Hamdi Redaksi Ahli: Ahmad Subakir, Maftuhin Rasmani, Khoirul Faizin, Otman Ralibi H. Ali, Dede Oetomo, M. Faishal Aminuddin, Fawaizul Umam, Aminoto Sa'doellah Pimpinan Redaksi: Akhol Firdaus Sidang Redaksi: Wahyuni Widyarningsih, Ahmad Zainul Hamdi, Akhol Firdaus Staf Redaksi: Muhammad Iqbal, Rahmat Ari Wibowo, Nanang Haryono Distribusi: Febrina Engelse Fuah Lay out: Kiki Diany Kontributor: Murdianto, Aan Anshori, Muhammad Mahpur, M. Nur Hasan, Yoyok Puji Atmoko Alamat Redaksi: CMARs, Jl. Jemursari VII No. 20 Surabaya 60237 Jawa Timur — Indonesia Telp. +62 31 8492188 Fax. +62 31 8492188 e-mail: cmars_911@hotmail.com Website: cmars.synthasite.com



Center for Marginalized Communities Studies

Penerbitan ini hasil kerjasama Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) dengan TIFA Foundation.

Redaksi menerima tulisan opini yang terkait dengan HAM dan kebebasan beragama/berkeyakinan. Setiap tulisan yang dimuat akan mendapatkan honorarium. Silahkan kirim tulisan opini Anda (dilengkapi biodata) ke alamat email redaksi: redaksi.syahadah@gmail.com